

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Diploma III Sebagai
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



SRI RAMADANI

NIM 2017/17133093

PROGRAM STUDI DIPLOMA III JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

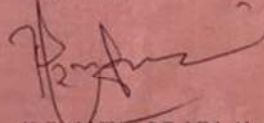
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : SRI RAMADANI
TM/NIM : 2017/17133093
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

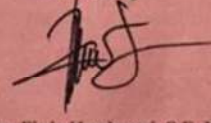
Padang, 13 November 2020

Diketahui oleh
Ketua Prodi



Halkadri Fitra, S.E, MM, Ak. CA
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Dian Fitria Handayani, S.E, M.Sc

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

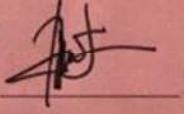
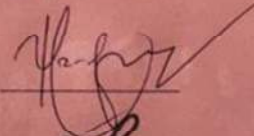
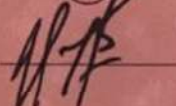
ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA : SRI RAMADANI
NIM / BP : 17133093 / 2017
Program Studi : D-III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Universitas Negeri Padang

Padang, 13 November 2020

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Dian Fitria Handayani, S.E., M.Sc	(ketua)	
2. Halkadri Fitra, S.E,MM. Ak. CA	(anggota)	
3. Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc	(anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri ramadani
Tahun Masuk / NIM : 2017 / 17133093
Tempat / Tanggal Lahir : Padang, 3 Januari 1999
Keahlian : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Koto Baru 1 No. 3 Padang
Judul Tanpa Akhir : Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas asli saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan Akademik baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik telah diperoleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, September 2020

Saya yang menyatakan,



Sri Ramadani

NIM. 17133093

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Sri Ramadani
NIM : 17133093
Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat
2020

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Penelitian ini menggunakan teknik analisis belanja, yaitu analisis efisiensi, analisis varian, analisis pertumbuhan dan analisis keserasian. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Bappeda selama 3 tahun.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini penelitian akan melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan data – data tertulis.

Berdasarkan analisa data yang dikumpulkan, diperoleh kesimpulan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator rasio laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja daerah.

Kata kunci : Kinerja, Laporan Ralisasi Anggaran, Belanja, Rasio.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Diploma Tiga (D3) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Padang beserta pimpinan fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Halkadri Fitra, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dian Fitria Handayani, S.E., M.Sc selau Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan tugas akhir.
4. Ibuk Herawati Darman, S.E selaku Kepala Bagian Keuangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

5. Seluruh karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
6. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas ilmu pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
7. Segenap staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah banyak membantu penulis selama ini.
8. Ayah, Ibu, beserta Kakak dan Adik dan seluruh keluarga besar tercinta yang tak henti-hentinya memberikan semangat baik moril maupun materil serta doa kepada penulis demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan, Salsa, Rini, Liza, Shela, Siska, Rani dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
10. Seluruh teman-teman seangkatan Tahun 2017, terutama Kelas Sanduak yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini.
12. Dan yang terakhir kepada diriku sendiri, terima kasih banyak karena telah kuat dan mampu bertahan sampai sejauh ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Padang, September 2020

Sri Ramadani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Pengertian Anggaran.....	10
B. Laporan Realisasi Anggaran	14
C. Pengertian Belanja	17
D. Kinerja Belanja.....	23
E. Pengertian Efisiensi, Varian, Pertumbuhan, dan Keserasian Belanja	27
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	30
A. Bentuk Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Rancangan Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Profil Instansi Pemerintah	35
B. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ...	42
C. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	60
Lampiran	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat	6
Tabel 2 Efisiensi Belanja Bappeda Sumbar	45
Tabel 3 Varian Belanja Bappeda Sumbar	48
Tabel 4 Pertumbuhan Belanja Bappeda Sumbar.....	51
Tabel 5 Keserasian Belanja Bappeda Sumbar	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya instansi pemerintah merupakan suatu lembaga yang mengurus seluruh kegiatan di dalam negeri maupun daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan instansi tersebut seperti pembayaran pajak, perizinan bangunan, pencatatan penduduk dan lain sebagainya. Hal ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, instansi pemerintah memerlukan anggaran belanja yang berguna menunjang kegiatan di pemerintahan tersebut. Anggaran belanja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sudah diatur dalam peraturan daerah dengan pertanggung jawaban dalam pengeluaran belanja.

Anggaran belanja yang digunakan dan dimanfaatkan oleh instansi merupakan hal yang sangat penting untuk diawasi oleh pihak terkait yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga tidak terjadi pengeluaran yang tidak bermanfaat serta melaksanakan anggaran dengan efisien, efektif dan meningkatkan pertumbuhan belanja daerah, serta sesuai dengan ketentuan –ketetapan yang berlaku pada Peraturan Daerah. Dikarenakan, pemerintah daerah menghadapi tekanan untuk lebih efisien dan memperhitungkan biaya ekonomi, biaya sosial, dan manfaatnya bagi publik serta dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melaksanakan anggaran belanja dengan efisien dan mengelola urusanurusan pengeluaran belanja dengan baik.

Dalam hal ini, pemerintah juga ditekankan untuk melaksanakan pertumbuhan belanja yang berkesinambungan. Sebab, salah satu faktor utama instansi tersebut memiliki kemampuan kinerja yang baik adalah meningkatkan pertumbuhan belanja dengan memperhitungkan keefisienan pengeluaran belanja serta keefektifan dalam penentuan belanja. Belanja ini berguna untuk keperluan instansi dan menunjang kegiatan-kegiatan atau keperluan didalam maupun diluar instansi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat teridentifikasi dengan jelas dan terstruktur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Penjelasan pemerintah tersebut mengisyaratkan semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa setiap pengeluaran daerah sudah memiliki ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur, sehingga dapat dengan mudah untuk dipertanggung jawabkan.

Menurut Mardiasmo (2004:169) menyatakan bahwa “Kelemahan utama dalam mengeluarkan belanja adalah tidak adanya ukuran yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, ratifikasi (pengesahan), implementasi dan evaluasi pengeluaran belanja. Oleh karena itu, pemborosan akan sangat mudah terjadi karena belanja yang tidak efisien sehingga belanja yang dikeluarkan melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan”.

Penentuan prioritas untuk tiap kegiatan pemerintah masih belum baik. Pemerintah daerah umumnya belum melakukan identifikasi kegiatan untuk penyusunan prioritas. Tetapi, lebih banyak menyesuaikan dengan arahan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Akibat orientasi seperti itu, maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat akan cenderung terabaikan.

Menurut Mardiasmo (2004:167) menyatakan bahwa “lemahnya perencanaan pengeluaran akan memunculkan kemungkinan *underfinancing and overfinancing* yang keseluruhannya mempengaruhi tingkat efisiensi serta pertumbuhan belanja dan efektifitas pada unit – unit kerja pemerintah daerah. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan untuk unit kerja yang menikmati *overfinancing* masalah yang dihadapi oleh efisiensi yang rendah.

Dalam situasi seperti ini, menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik yang habis dibelanjakan seluruhnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penetapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya (readibel information) yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif pemerintah daerah perlu menetapkan prinsip – prinsip manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten dan berkelanjutan. Menurut Halim (2007:129) menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan dua aspek dengan optimalisasi, yaitu aspek pendapatan dan pengeluaran. Tetapi, manajemen belanja daerah perlu mendapat perhatian lebih besar dibandingkan manajemen pendapatan. Sebab mengeluarkan uang jauh lebih mudah dibandingkan memperolehnya. Dalam kondisi tertentu, seringkali menghemat anggaran lebih sulit dibandingkan mengejar target pendapatan”.

Disamping itu, banyaklah terjadi korupsi pada aspek pengeluaran, seperti pada belanja pengadaan barang dan jasa dan belanja modal. Karena sifat pengeluaran yang mudah dilakukan dan rawan korupsi tersebut maka untuk mengurangi pemborosan anggaran, penyelewengan dan korupsi anggaran, pemerintah daerah perlu memperkuat manajemen belanja daerah. Hal itu penting karena manajemen belanja tidak sekedar terkait dengan strategi dan kebijakan bagaimana mengalokasikan anggaran secara efisien, efektif, adil dan merata.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga teknis yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan dalam aspek terbentuknya. Dalam hal ini sangatlah penting bagi Bappeda dalam menentukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya. Instansi pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga melalui kegiatan belanja tersebut dapat dilihat apakah pelaksanaan anggaran belanja sudah terealisasi atau belum dengan mengutamakan pengeluaran belanja.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Uraian	2017		2018		2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggran	Realisasi
Belanja Daerah	26.886.733.754	25.223.724.968	28.086.978.250	24.638.098.164	26.441.368.552	25.608.148.339
Belanja Operasi	25.633.031.089	24.093.442.678	26.461.406.150	23.141.447.914	24.590.768.419	23.790.121.589
1. Belanja Pegawai	9.991.707.456	9.796.030.620	9.854.070.778	8.038.320.890	8.814.482.237	8.634.160.398
2. Belanja Barang dan Jasa	15.641.323.633	14.297.412.058	16.607.335.372	15.103.127.024	15.776.286.182	15.155.961.191
Belanja Modal	1.253.702.665	1.130.282.290	1.625.572.100	1.496.650.250	1.592.586.100	1.561.411.750
1. Belanja Peralatan dan Mesin	1.244.808.475	1.122.168.290	1.617.950.000	1.489.028.800	1.569.964.000	1.542.568.200
2. Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	258.014.033	256.615.000
3. Belanja Aset Tetap Lainnya	8.894.190	8.114.000	7.622.100	7.621.450	22.622.100	18.843.550

Sumber Data: Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas, data pengeluaran yang diperoleh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan. Dari fenomena tersebut dan dilihat dari pencapaian yang fluktuasi. Hal ini memungkinkan kinerja pada instansi tersebut mengalami gangguan internal yang mengakibatkan nilai pencapaian berbeda tiap tahunnya. Nilai pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 97,85 %, sedangkan penurunan nilai pencapaian terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 87,72 %. Penurunan inilah yang mengalami gangguan internal dan memperlihatkan kinerja instansi yang kurang baik.

Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh instansi terkait dan sebab itulah kinerja anggaran memiliki peran untuk memperlihatkan kepada instansi tentang anggaran belanja tiap tahunnya.

Dan dengan memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja anggaran, maka instansi dapat mengevaluasi dan mempelajari apa yang harus diperbaiki baik itu sistem anggaran maupun program kerja anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan pembahasan melalui rasio efisiensi, varian belanja, pertumbuhan belanja, dan keserasian belanja. Karena rasio tersebut menunjukkan keberhasilan atau ketidak mampuan instansi dalam pencapaian kegiatan dan memperlihatkan pertumbuhan belanja di dalam instansi tersebut. Dengan melihat laporan realisasi anggaran belanja sehingga penulis memilih judul **“Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis efisiensi belanjapada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019 ?
2. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis varian belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019 ?

3. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis pertumbuhan belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019 ?
4. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis keserasian belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis efisiensi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019.
2. Untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis varian pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019.
3. Untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis pertumbuhan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019.
4. Untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis keserasian pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dan bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan yang terjadi dalam instansi pemerintah, khususnya bagian bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan rasio efisiensi, efektifitas, varian pertumbuhan dan keserasian belanja.

2. Bagi Universitas Negeri Padang

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa khususnya yang ada di jurusan akuntansi yang akan menyelesaikan Tugas Akhir (TA) serta sebagai tambahan pembendaharaan.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam menganalisa rasio efisiensi, efektifitas, varian pertumbuhan dan keserasian belanja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kinerja realisasi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2019, sesuai dengan tujuan penelitian maka hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil kinerja realisasi anggaran belanja pada Bappeda secara umum dapat dikatakan baik karena dari tahun 2017–2019 tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 25.223.724.968 atau mencapai 93,81 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 26.886.733.754 Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 24.638.098.164 atau mencapai 87,72 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 28.086.978.250. Dan pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp 25.608.148.339 atau mencapai 98,84 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 26.441.368.552 Dari ketiga tahun tersebut bisa dilihat bahwa persentase realisasi berada dibawah anggaran atau <100% (kecil dari 100%) yang artinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah ekonomis dalam merealisasikan anggaran belanjanya.
2. Dalam mengukur besarnya tingkat efisiensi yang digunakan pada anggaran belanja tahun 2017–2019, dengan menggunakan analisis varians belanja maka dapat diketahui bahwa Bappeda kurang

efisien dalam penggunaan anggaran belanjanya, yaitu lebih dari >90%. Jika dilihat dari tingkat rasio efisiensi belanja bahwa penggunaan anggaran kurang efisien disebabkan belum berhasilnya memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minim untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Besarnya laju pertumbuhan belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisis pertumbuhan belanja dari tahun 2017 – 2019 terus mengalami naik turun atau fluktuasi. Dari analisis pertumbuhan belanja tahun anggaran 2017/2018 menunjukkan pertumbuhan negatif dengan rata – rata sebesar 2,32%, sedangkan tahun 2018 – 2019 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,93%.
4. Berdasarkan hasil perhitungan analisis keserasian belanja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat lebih memprioritaskan terhadap anggaran pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal, hal ini berarti Bappeda Provinsi Sumatera Barat lebih mengoptimalkan pada pelaksanaan untuk jalannya pemerintahan dibandingkan dengan pengoptimalan pembangunan daerahnya yang masih minim. Rata – rata belanja operasi tahun 2017 – 2019 adalah 94,11% sedangkan rata – rata belanja modal tahun 2017 – 2019 adalah sebesar 5,88%. Hal ini kurang baik, sebab pemerintahan seharusnya lebih mementingkan untuk pembangunan didaerahnya

atau setidaknya harus seimbang antara belanja operasi dan belanja modal.

B. Saran

1. Bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 - a. Untuk kinerja realisasi anggaran belanja pada Bappeda agar dapat meningkatkan pertumbuhan belanja terus naik sehingga tidak terjadi adanya pertumbuhan negatif.
 - b. Dapat terus mengefisienkan anggaran belanja operasi dan belanja modal supaya tidak terjadi pemborosan anggaran.
2. Bagi penelitian selanjutnya :
 - a. Diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan menambah rasio – rasio keuangan lainnya.
 - b. Dapat menambah periode tahun anggaran, agar lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Dharmawati. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Artikel. *Ilmiah Mahasiswa*
- Erlina. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kasiram. 2008. *Metedologi Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan
Daerah
- Peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang
Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendatan Belanja
Daerah